

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

---



### Pertemuan Ke-7 Kelompok Kerja INTOSAI Key National Indicators

## Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas serta Mencegah Korupsi

**Kuta, Selasa (25 Februari 2014)** – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menjadi tuan rumah Pertemuan ke-7 Kelompok Kerja Badan Pemeriksa Sedunia (INTOSAI) *Key National Indicators* di Sheraton Bali Kuta Resort, Bali pada 25-26 Februari 2014.

Pertemuan ketujuh tersebut diikuti oleh 15 *Supreme Audit Institutions* (SAI) atau badan pemeriksa negara-negara anggota *the International Organisation of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) atau badan pemeriksa sedunia, yaitu: Armenia, Bulgaria, Cina, Finlandia, India, Indonesia, Italia, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Slovakia, Afrika Selatan, Ukraina, Amerika Serikat dan Zambia. Pertemuan ini dibuka oleh Ketua BPK, **Hadi Poernomo**, dan dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, **Hasan Bisri**, Anggota BPK, **Sapto Amal Damandari** Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, **Armida Alisjahbana**, sebagai *keynote speaker*, Gubernur Provinsi Bali, **Made Mangku Pastika**, Ketua INTOSAI *Working Group on Key National Indicators*, **Tatiana Manuylova**, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali, pejabat pemerintah daerah di Bali, dan para pejabat pelaksana di lingkungan BPK RI.

Pertemuan ketujuh ini merupakan kelanjutan dari pertemuan keenam pada 2013 lalu di Krakow, Polandia. Tujuan dari pertemuan ketujuh ini adalah untuk diskusi mengenai perkembangan rencana kerja Kelompok Kerja INTOSAI *Key National Indicators*, dan berbagi pengalaman di bidang *Key National Indicators* antara sesama anggota Kelompok Kerja INTOSAI *Key National Indicators*.

INTOSAI *Working Group on Key National Indicators* adalah sebuah kelompok kerja yang dibentuk oleh organisasi badan pemeriksa se-dunia (INTOSAI) atas rekomendasi dari Kongres ke-19 INTOSAI di Mexico City pada 2007. Dengan tujuan untuk meningkatkan peran badan pemeriksa dalam menilai efisiensi dan efektivitas dari sumber daya nasional, serta untuk meningkatkan kredibilitas INTOSAI dalam menyusun dan menggunkan indikator-indikator kunci nasional.

**Hadi Poernomo** mengatakan Ketidakefisienan penggunaan sumber daya dan ketidakjelasan fokus kerap terjadi tidak hanya pada implementasi sebuah kebijakan pembangunan, tetapi juga terjadi pada proses perencanaannya. Kelompok kerja ini berupaya membantu pemerintah tiap negara untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan kepercayaan publik dalam upaya memerangi korupsi dan menilai efektivitas dan sumber daya nasional bagi kepentingan negara dan rakyatnya. Hal ini sesuai dengan visi dan tujuan BPK, sehingga BPK ikut bergabung sebagai anggota dalam kelompok kerja ini secara resmi pada 23 Januari 2009.

Seperti diungkapkan oleh **Armida Alisjahbana**, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, di Indonesia, model *Key National Indicators* telah dikembangkan sejak tahun 1970-an dan digambarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) – 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) – 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

---

#### Informasi lebih lanjut:

**Djatu Apriellia**, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali  
Telp. (0361) 229193 Ext. 210, Fax. (0361) 229184, 256205  
Email : subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



---

(RPJMD). Dokumen tersebut digunakan Pemerintah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

**Hadi** menegaskan bahwa implementasi dari rencana pembangunan tersebut menggambarkan kinerja pemerintahan. BPK, sesuai dengan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, berperan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan tersebut melalui rekomendasi hasil pemeriksaannya. Saat ini, BPK mengembangkan e-audit melalui akses data on-line ke sistem informasi entitas terperiksa dan pembentukan Pusat Data BPK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, termasuk untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara serta pemeriksaannya, demikian ungkap **Hadi**.

“Saya percaya pertemuan ini akan menginspirasi keberhasilan upaya kita bersama dalam mengembangkan efisiensi, transparansi dan kepercayaan publik dalam rangka memerangi korupsi dan menilai efektivitas dan penggunaan sumber daya nasional untuk kepentingan negara dan rakyat”, demikian penegasan **Hadi**.

**BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI BPK RI**

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Djatu Apriellia**, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali  
Telp. (0361) 229193 Ext. 210, Fax. (0361) 229184, 256205  
Email : subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com